



PEMERINTAH KOTA BONTANG

NOTA KESEPAKATAN

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BONTANG TAHUN ANGGARAN 2024**



BONTANG, JULI 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG

NOMOR : 100.3.3/28/HUK/2024
400.10.5.1/7/NK /KP1/DPRD

TANGGAL : 29 JULI 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Basri Rase, S.IP, M.Si
Jabatan : Wali Kota Bontang
Alamat Kantor : Jl. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bontang,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. a. Nama : Andi Faizal Sofyan Hasdam, S.H
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bontang
Alamat Kantor : Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

b. Nama : Junaidi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bontang
Alamat Kantor : Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

c. Nama : Agus Haris, S.H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bontang
Alamat Kantor : Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bontang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bontang, 29 Juli 2024

WALI KOTA BONTANG

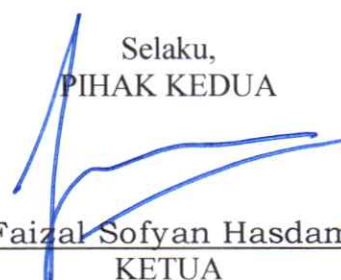
Selaku,
PIHAK KESATU



Basri Rase, S.IP, M.Si

PIMPINAN DPRD
KOTA BONTANG

Selaku,
PIHAK KEDUA



Andi Faizal Sofyan Hasdam, S.H
KETUA



Junaidi
WAKIL KETUA

Agus Haris, S.H
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.1.1. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia.....	5
2.1.2. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur.....	11
2.1.3. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bontang	16
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	21
2.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Nasional	21
2.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalimantan Timur	22
2.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Kota Bontang	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	25
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	25
3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024.....	25
3.1.2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2024	26
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	27
3.2.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Bontang Tahun 2024.....	27
3.2.2. Kebijakan Makro Fiskal Kota Bontang Tahun 2024	28



BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	29
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksi untuk Tahun 2024	29
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	29
4.1.1. Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah	29
4.1.2. Perubahan Target Pendapatan Transfer	30
4.1.3. Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31
BAB V KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH	34
5.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah.....	34
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.....	34
5.1.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi.....	34
5.1.2. Rencana Perubahan Belanja Modal	35
5.1.3. Rencana Perubahan Belanja Tidak Terduga.....	36
5.1.4. Rencana Perubahan Belanja Transfer	36
BAB VI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	39
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	40
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	40
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN PERUBAHAN	43
7.1. Strategi Pencapaian Perubahan Pendapatan Daerah	43
7.2. Strategi Pencapaian Perubahan Belanja Daerah	44
7.3. Strategi Pencapaian Perubahan Pembiayaan Daerah.....	46
BAB VIII P E N U T U P	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2024.....	9
Tabel 2.2. Sasaran Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2024	15
Tabel 2.3. Target Ekonomi Makro Kota Bontang Tahun 2024	20
Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023 – 2024	26
Tabel 3.2. Postur Makro Fiskal, 2023 – 2025 (dalam % PDB).....	27
Tabel 3.3. Target Indikator Makro Kota Bontang Tahun 2024	28
Tabel 3.4. Kebijakan Makro Fiskal Kota Bontang Tahun 2024 (dalam milyar rupiah)	28
Tabel 4.1. Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024	29
Tabel 4.2. Perubahan PAD Kota Bontang Tahun 2024.....	30
Tabel 4.3. Perubahan Pendapatan Transfer Kota Bontang Tahun 2024.....	30
Tabel 4.4. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bontang yang Ditarget Pada Tahun 2024	31
Tabel 4.5. Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022–2024 (dalam rupiah)	32
Tabel 4.6. Distribusi Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022–2024 (dalam persen).....	33
Tabel 5.1. Perubahan Belanja Daerah Kota Bontang yang Ditarget Pada Tahun 2024.....	34
Tabel 5.2. Perubahan Belanja Operasi Kota Bontang Tahun 2024.....	35
Tabel 5.3. Perubahan Belanja Modal Kota Tahun 2024.....	35
Tabel 5.4. Perubahan Belanja Tidak Terduga Kota Bontang Tahun 2024.....	36
Tabel 5.5. Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2022–2024 (dalam rupiah)	37
Tabel 5.6. Distribusi Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2022 – 2024 (dalam persen)	37
Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Tahun 2024 (dalam rupiah)	39
Tabel 6.2. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah).....	40
Tabel 6.3. Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang Tahun 2024 (dalam rupiah).....	41
Tabel 6.4. Realisasi, Proyeksi, dan Penetapan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2022–2024 (dalam rupiah).....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022-2024 (Triwulan).....	5
Gambar 2.2.	Tingkat Inflasi Nasional Mei 2023 – Mei 2024.....	6
Gambar 2.3.	Tingkat Inflasi Produsen Nasional Triwulan I 2023 hingga Triwulan I 2024	7
Gambar 2.4.	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, September 2012 – Maret 2023	7
Gambar 2.5.	Angka Stunting Indonesia 2018–2024	8
Gambar 2.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur 2022-2024 (Triwulan).....	11
Gambar 2.7.	Tingkat Inflasi Kalimantan Timur Januari – Mei 2024.....	12
Gambar 2.8.	Tingkat Penduduk Miskin Kalimantan Timur 2018–2024	13
Gambar 2.9.	Angka Stunting Kalimantan Timur 2018–2024.....	14
Gambar 2.10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas, Pertambangan, dan Penggalan Kota Bontang 2016-2024	16
Gambar 2.11.	Tingkat Inflasi Kota Samarinda Januari – Mei 2024.....	17
Gambar 2.12.	Tingkat Penduduk Miskin Kota Bontang 2018–2024.....	18
Gambar 2.13.	Angka <i>Stunting</i> Kota Bontang 2018–2024.....	19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA APBD

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang dapat berupa:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 juga disusun berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi dan sekaligus terkait kebijakan nasional, perintah dari peraturan perundang-undangan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang secara integral sejalan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perubahan Kebijakan Umum APBD memiliki sistematika penjabaran yang relatif sama dengan KUA, yaitu: memuat target pencapaian kinerja secara terukur dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk



setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai juga dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 bertujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bontang dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Penyusunan RKA-SKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 yang secara bersamaan setelah melalui mekanisme pembahasan akan dituangkan dalam Dokumen Nota Kesepakatan.
- 2) Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Bontang Nomor 69; dan
22. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp 5.288,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 3.112,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen.



Gambar 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022-2024 (Triwulan)
(Sumber: BRS, BPS-Mei 2024)

Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 36,69 persen. Selama triwulan I-2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menunjukkan pengaruhnya secara spasial dalam perekonomian Indonesia dengan mencatat peranan sebesar 57,70 persen walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,84 persen dibanding triwulan I-2023.

Dalam cakupan ekonomi makro salah satu acuan yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan sebuah fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Pemeliharaan stabilitas harga terus menjadi tujuan utama dari kebijakan



makro ekonomi untuk sebagian. Pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan, yaitu: inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu: tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen.

Perkembangan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,84 persen, atau terjadi kenaikan IHK secara umum dari 103,43 pada Mei 2023 menjadi 106,37 pada Mei 2024. Inflasi pada periode ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,54 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,85 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,06 persen; kelompok transportasi sebesar 1,34 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,60 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,71 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,99 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,16 persen.



Gambar 2.2.
Tingkat Inflasi Nasional Mei 2023 – Mei 2024
(Sumber: BRS, BPS-Juni 2024)

Indeks Harga Produsen (IHP) umum sembilan sektor pada triwulan I-2024 sebesar 131,25. IHP umum sembilan sektor tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen dibandingkan IHP umum sembilan sektor pada triwulan IV-2023 yang sebesar 130,77. Kenaikan IHP umum sembilan sektor ini disebabkan oleh kenaikan Sektor Jasa Pendidikan sebesar 3,57 persen; Jasa Pengelolaan air 3,00 persen; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,25 persen; Sektor Industri Pengolahan sebesar 0,92 persen; Sektor Jasa Penyediaan Akomodasi dan Penyajian Makanan dan Minuman sebesar 0,75 persen; Sektor jasa kesehatan sebesar 0,55 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,02 persen. Sementara itu, Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami deflasi sebesar 1,47 persen dan Sektor Jasa Pengangkutan yang turun sebesar 1,74 persen.

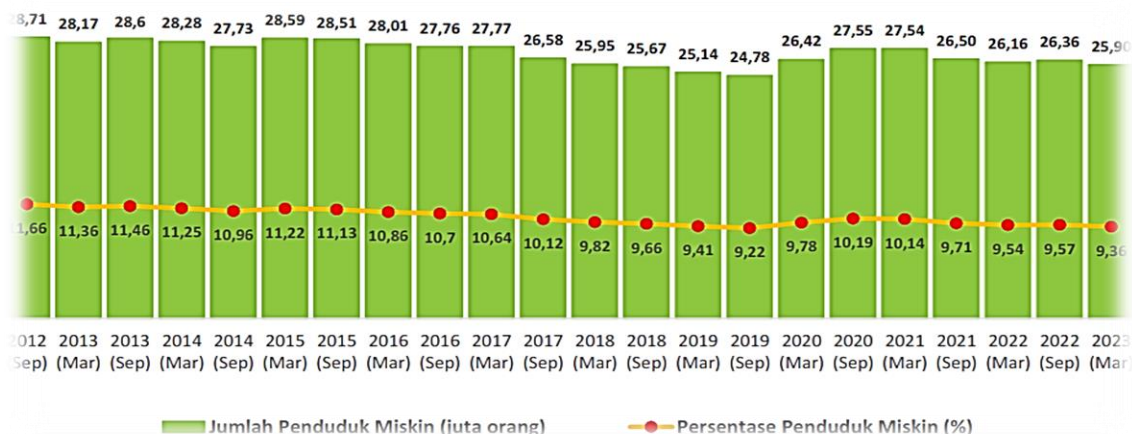


Gambar 2.3.

Tingkat Inflasi Produsen Nasional Triwulan I 2023 hingga Triwulan I 2024

(Sumber: BRS, BPS-Mei 2024)

Berubahnya tingkat inflasi akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi/rendah. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Tingkat kemiskinan akan menjadi lebih ekstrem jika mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia yang cenderung menurun. Pengurangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu komitmen Indonesia yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan juga *Sustainable Development Goals/SDGs* yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030.



Gambar 2.4.

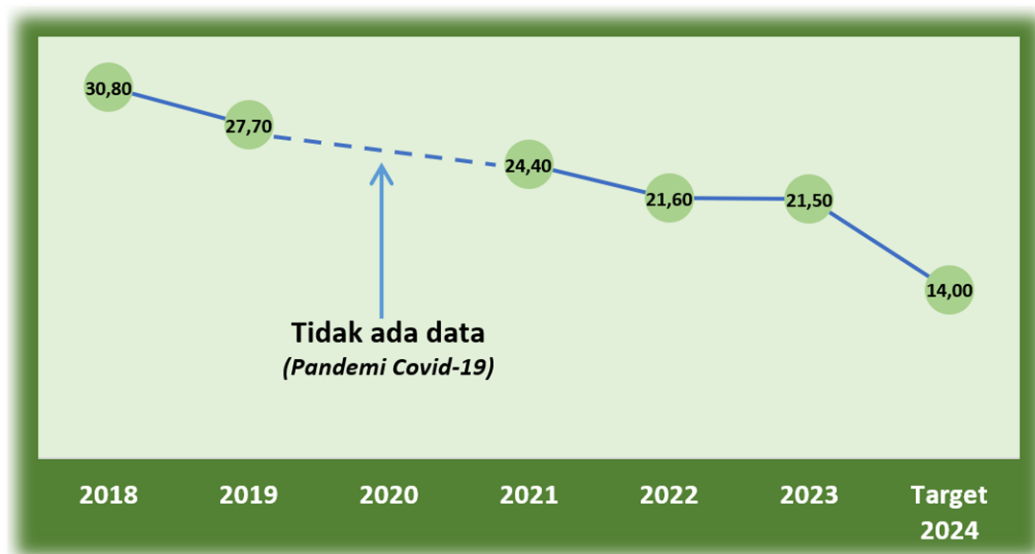
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, September 2012 – Maret 2023

(Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, BPS)

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi seseorang hidup dengan pengeluaran kurang dari US\$1,9 per hari atau setara kurang lebih Rp 45.000 per hari. Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 2,04 persen, kemudian turun menjadi 1,74 persen di bulan September 2022, dan 1,12 persen pada Maret 2023. Diperkirakan pada akhir 2023, angka kemiskinan ekstrem akan

turun lagi menjadi 0,5 persen. Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan. Adapun, tingkat kemiskinan untuk 2024 telah ditargetkan menjadi 7,5 persen. Sementara itu, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 7 hingga 8 persen.

Kemiskinan merupakan salah satu yang dapat mengakibatkan terjadinya *stunting* dengan berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini dinilai cukup baik karena dapat berdampak pada penurunan angka *stunting*. Kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia dari usia balita sampai dengan lajut usia. Sebagian besar *stunting* berasal dari keluarga yang tergolong miskin atau berada di bawah garis kemiskinan. Adanya kemiskinan mengakibatkan keluarga tidak dapat mencukupi kualitas dan kuantitas dalam pemberian gizi pada anggota keluarga. Adapun angka *stunting* di Indonesia secara konsisten mengalami penurunan sejak 2019 yang berada pada 12,10 persen. Kemudian, kembali menurun pada tahun 2020, 2021, 2022, hingga 2023 21,6 persen. Kondisi ini menunjukkan penurunan terbaik dalam tujuh tahun terakhir.



Gambar 2.5.
Angka Stunting Indonesia 2018–2024
 (Sumber: Survei Kesehatan Indonesia, Kemenkes- 2024)

Usaha Pemerintah untuk terus menurunkan kasus *stunting* di Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di mana prevalensi *stunting* di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Namun pada 2023 hanya turun sedikit dan belum mencapai target yang diinginkan sebesar 17,8 persen. Pemerintah menargetkan penurunan angka *stunting* menjadi 14% pada akhir 2024. Untuk



mencapai target tersebut, pemerintah harus mengupayakan penurunan angka *stunting* sebesar 3,6 persen setiap tahunnya.

Kondisi dan proyeksi dari perekonomian nasional, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, dan angka *stunting* merupakan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur untuk menyusun RKP tahun 2024 dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Tabel 2.1. Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SASARAN 2024
1.	Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,3 – 5,7
2.	Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% yof); Akhir Periode	1,5 – 3,5
4.	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,1 – 150,2
5.	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,0 – 5,8
6.	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,5 – 0,4
7.	Penerimaan perpajakan (% PDB)	10,0 – 10,2
8.	Keseimbangan Primer (%PDB)	0,00 – (0,4)
9.	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2) – (2,6)
10.	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,1 – 39,0
11.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,2 – 7,0
12.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.450 – 1.650
13.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	662,7 – 731,1
14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7
15.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
16.	Rasio Gini	0,374 – 0,377
17.	IPM	73,99 – 74,02
18.	Penurunan Emisi GRK (%)	27,27

Sumber: RKP Tahun 2024 (diolah)

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan



meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$4.970-5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori *upper-middle income countries*. Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 serta tetap menjaga kinerja baik indikator makro fiskal untuk menjamin kesinambungan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Dalam jangka pendek diarahkan tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah pada rentang Rp 14.700-Rp 15.200 per US\$. Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 5,0-5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374-0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99-74,02. Kebiasaan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator Nilai Tukar Petani pada kisaran 105-108 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 107-110.

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045. Adapun kebijakan ekonomi makro Indonesia pada tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha;
- 2) Pembangunan Inklusif, diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- 3) Pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi; dan
- 4) Mewujudkan stabilitas ekonomi, untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian.

2.1.2. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I-2024 terhadap Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 7,26 persen, mengalami percepatan dibandingkan dengan kinerja ekonomi Triwulan I-2023 yang tumbuh sebesar 6,99 persen. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2024 didorong oleh capaian kinerja pada hampir seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif, kecuali Industri Pengolahan yang berkontraksi sebesar 0,64 persen. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu: Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,44 persen; diikuti Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 17,09 persen; dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 12,26 persen. Selanjutnya diikuti oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebagai lapangan usaha utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang tumbuh sebesar 10,51 persen.



Gambar 2.6.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur 2022-2024 (Triwulan)

(Sumber: BRS, BPS Kaltim-Mei 2024)

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2024, enam belas lapangan usaha memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja ekonomi Kalimantan Timur. Tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi positif terbesar, yaitu: Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 4,79 persen; kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 1,04 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,39 persen. Sementara itu, satu lapangan usaha yang memberikan andil negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yaitu: Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan andil negatif sebesar 0,13 persen.

Pada dimensi ekonomi berbagai variabel kinerja makro ekonomi sebagai tujuan antara. Salah satu variabel kinerja makro ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Seperti Kalimantan Timur dengan

perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Tingkat inflasi Kalimantan Timur di 4 kabupaten/kota, pada Mei 2024 terjadi inflasi sebesar 3,29 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,80 pada Mei 2023 menjadi 107,22 pada Mei 2024. Kondisi tingkat inflasi yang diakibatkan adanya perubahan harga baik itu konsumen maupun produsen diperkirakan akan terus memberikan dampak positif maupun negatif pada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ditahun 2025. Situasi ini, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 tingkat inflasi diproyeksikan akan bergerak dalam rentang 2,7-4,5 persen.

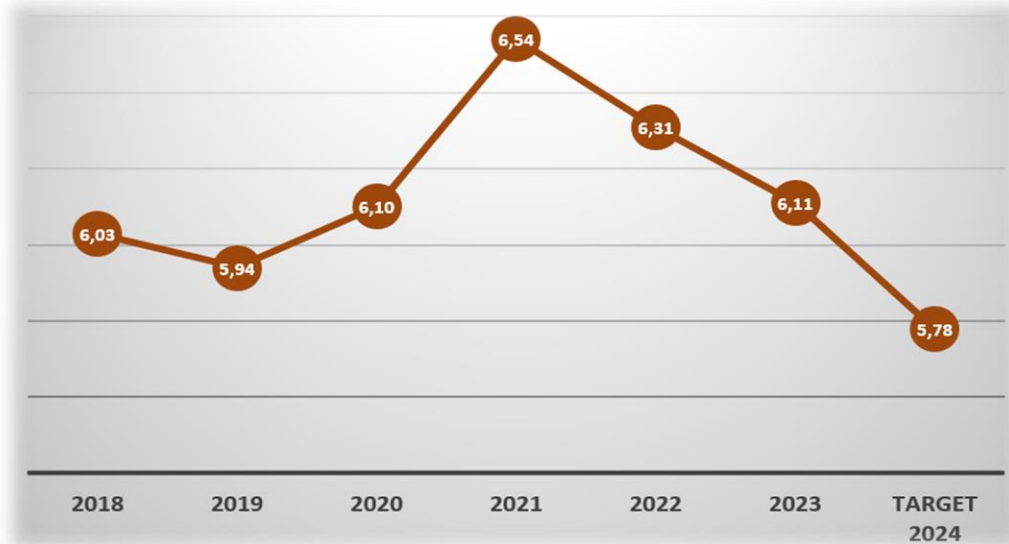


Gambar 2.7.
Tingkat Inflasi Kalimantan Timur Januari – Mei 2024
(Sumber: BRS, BPS-Juni 2024)

Terjadinya inflasi secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, akan mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari akan barang ataupun jasa. Penurunan kemampuan ini menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang akan mengakibatkan bertambahnya masyarakat miskin atau sering disebut penduduk miskin. Secara umum, perkembangan tingkat penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018-2023. Tingkat penduduk miskin turun dari 6,03 persen pada tahun 2018 menjadi 6,11 persen pada tahun 2022 atau turun sebesar lebih dari 0,08 poin. Pada 2024 diharapkan penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 5,78 persen.

Penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial ekonomi selama periode 2018-2023, antara lain laju inflasi, pertumbuhan ekonomi yang positif, kenaikan nilai tukar petani, panen raya, dan bantuan sosial yang konsisten disalurkan. Selain itu, konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan, dengan memperhatikan garis kemiskinan makanan dan non makanan yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kalimantan Timur. Target yang diharapkan untuk tingkat penduduk miskin Kalimantan Timur di tahun 2024 adalah sebesar 5,78 persen. Sementara itu,

berdasarkan profil kemiskinan Kalimantan Timur Maret 2023 sebesar 6,11 persen. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun hingga 5,67 persen.



Gambar 2.8.

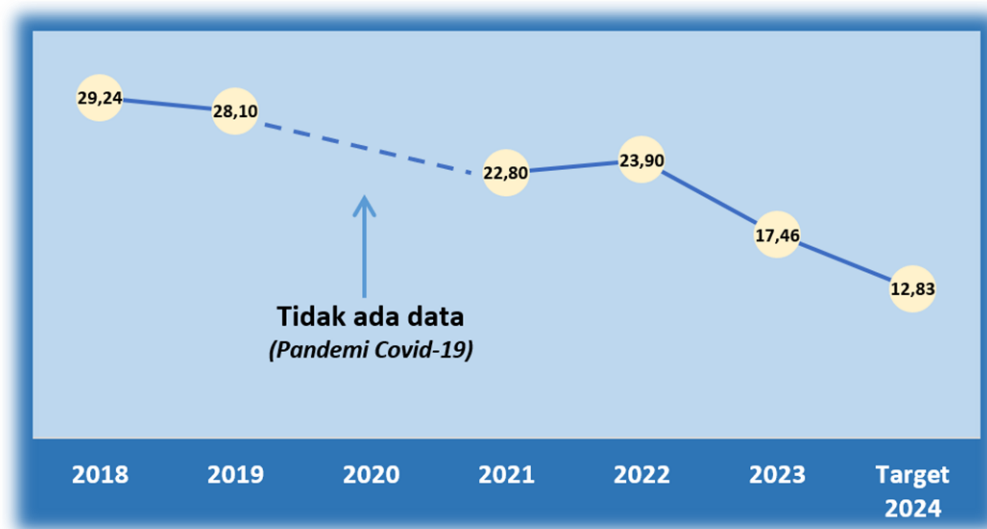
Tingkat Penduduk Miskin Kalimantan Timur 2018–2024

(Sumber: diolah dari Profil Kemiskinan Kalimantan Timur, BPS-2024)

Pembangunan suatu daerah juga memperhatikan tingkat kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di daerah tersebut. Dimana kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia dari usia balita sampai dengan lanjut usia. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*. Percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2027 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan secara integrasi dan konvergen dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* di 10 kabupaten/kota. Prevalensi *stunting* di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 23,9 persen pada 2022 menjadi 17,46 persen pada 2023 dan diharapkan mendekati target sebesar 12,83 persen pada 2024. Penurunan prevalensi *stunting* tersebut diperoleh dari kabupaten/kota yang tersebar di Kalimantan Timur, antara lain: di Kabupaten Berau dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 20,16 persen pada 2023; di Kota Samarinda dari 25,3 persen menjadi 19,92 persen; Balikpapan dari 19,6 persen menjadi 13,36 persen; dan Penajam Paser

Utara dari 21,8 menjadi 14,1 persen. Prevalensi *stunting* Kalimantan Timur sebesar 17,46 persen ini dalam kategori sedang. Dari 10 kabupaten/kota, Kota Bontang merupakan daerah dengan prevalensi *stunting* tertinggi yakni 23,26 persen, naik ketimbang tahun sebelumnya yang 21,6 persen.



Gambar 2.9.

Angka Stunting Kalimantan Timur 2018–2024

(Sumber: diolah dari hasil SKI Kalimantan Timur, Dinkes Kaltim-2024)

Upaya pemerintah Kalimantan Timur untuk menurunkan angka *stunting* melalui Dinas Kesehatan bersama pihak terkait melakukan berbagai intervensi dengan menjalankan program-program kesehatan secara intens, dan terus melakukan pembinaan dan koordinasi dengan kabupaten/kota. Sehingga target yang diharapkan untuk angka *stunting* Kalimantan Timur di tahun 2024 adalah mencapai 12,83 persen.

Kondisi dan proyeksi dari perekonomian, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, dan angka *stunting* di Kalimantan Timur ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur untuk menyusun RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan tema “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan Pembangunan difokuskan pada upaya-upaya strategis dan taktis untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD. Dengan dicapainya tujuan dan sasaran pembangunan, maka diharapkan dapat tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing Kalimantan Timur.

terwujudnya tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan dapat terus tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada Tahun 2024, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati



oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sasaran Ekonomi Makro Kalimantan Timur Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SASARAN 2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,00 – 5,00
2.	PDRB Per Kapita (juta Rp)	255,00
3.	Laju inflasi (%)	3,00 – 4,00

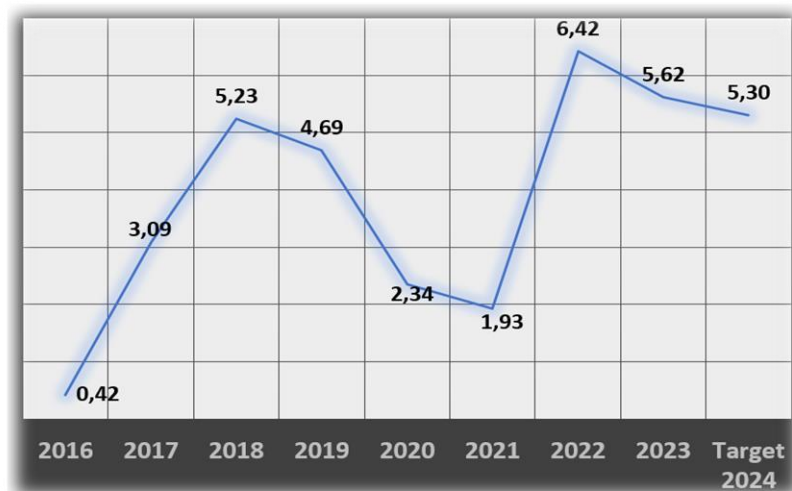
Sumber: RKPD Kaltim Tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan akan berada pada angka 4,00-5,00 persen, dengan PDRB Per Kapita diharapkan dapat mencapai Rp 255 juta dengan tingkat inflasi rata-rata 3 – 4 persen. Capaian target ekonomi makro daerah ini telah ditetapkan pada tahun 2024. Atas dasar ini Provinsi Kalimantan Timur menetapkan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut:

- 1) Mencapai pertumbuhan ekonomi 4,00 - 4,90 persen melalui:
 - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong operasional pabrik-pabrik pengolahan produk kelapa sawit, seperti: biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
 - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi di sektor pangan dan ekstensifikasi di sektor perkebunan (optimalisasi pemanfaatan kawasan perkebunan);
 - c) Mendorong peningkatan sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi makan dan minum dengan menangkap peluang bangkitan ekonomi terhadap pembangunan IKN; dan
 - d) peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.
- 2) Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan meningkatkan trickle down effect pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui upaya peningkatan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
- 3) Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 6 persen, melalui:
 - a) Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah;
 - b) Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga;
 - c) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang dapat memicu pertumbuhan sektor lainnya; dan
 - d) Mendorong peran komoditas hasil olahan industri untuk peningkatan ekspor perdagangan antar wilayah.

2.1.3. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bontang

Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengarah pada kondisi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah seperti perekonomian Kota Bontang tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 68,11 triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 42,63 triliun rupiah. Ekonomi Kota Bontang tahun 2023 tumbuh sebesar 4,16 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022.



Gambar 2.10.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas, Pertambangan, dan Penggalian Kota Bontang 2016-2024

(Sumber: diolah dari PDRB, BPS Bontang-Juni 2024)

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas dan Jasa Keuangan dan Asuransi yang masing-masing tumbuh sebesar 17,41 persen dan 10,19 persen. Struktur Ekonomi Kota Bontang didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha, yakni: Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 78,37 persen dan Konstruksi dengan peranan sebesar 7,37 persen. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 3,39 persen, dan Transportasi dan Pergudangan dengan peranan sebesar 1,85 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,16 persen. Dari sisi PDRB menurut lapangan usaha, pertumbuhan pada tahun 2023 didorong oleh seluruh sektor lapangan usaha yang tumbuh positif kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar 5,93 persen dibandingkan tahun 2022. Dalam lingkup regional Kalimantan Timur, PDRB Kota Bontang tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 8,07 persen terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Variabel kinerja makro ekonomi salah satunya yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator

perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Saat ini tingkat inflasi Kota Bontang masih menggunakan rujukan dari tingkat inflasi Kota Samarinda, sedangkan kondisi perkembangan ekonomi antara Bontang dan Samarinda berbeda. Inflasi yang didasarkan harga barang dan jasa yang mewakili konsumsi masyarakat dan menghitung rata-rata perubahan harga atau Indeks Harga Konsumen. Pada Mei 2024 terjadi inflasi Kota Samarinda sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,83. Kondisi tingkat inflasi yang diakibatkan adanya perubahan harga baik itu konsumen maupun produsen diperkirakan akan terus memberikan dampak positif maupun negatif pada perekonomian Kota Bontang ditahun 2025. Situasi ini, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021–2026 tingkat inflasi diproyeksikan akan bergerak dalam rentang 2,4–2,8 persen.

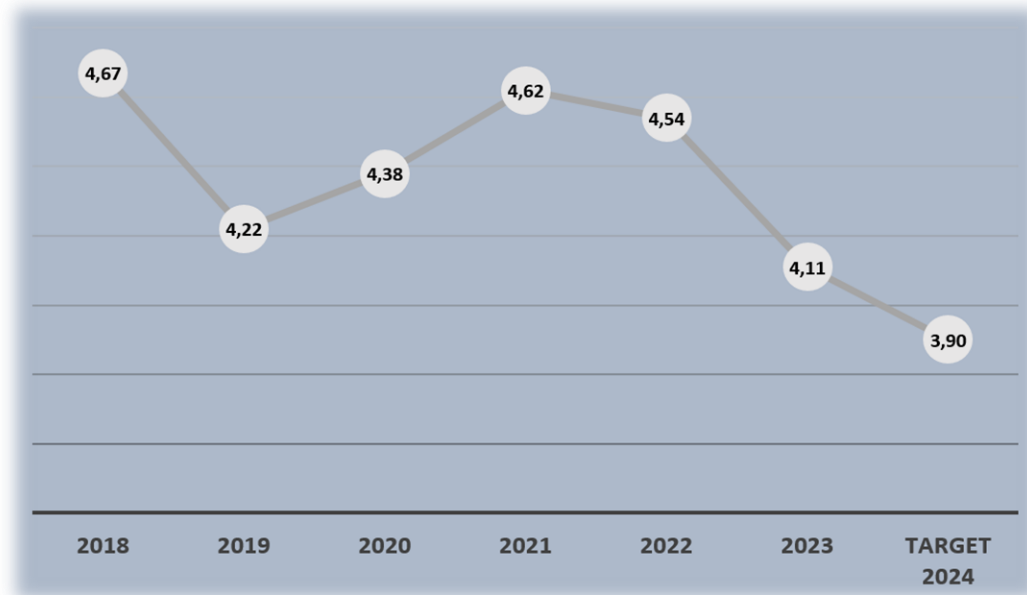


Gambar 2.11.
Tingkat Inflasi Kota Samarinda Januari – Mei 2024
 (Sumber: BRS, BPS Kota Samarinda-Juni 2024)

Suatu daerah dipandang berhasil atau tidak dalam memecahkan permasalahan ekonomi dapat dilihat dari kinerja ekonomi makro daerah tersebut. Apabila inflasi meningkat, maka tingkat kesejahteraan menjadi terganggu, yakni: daya beli masyarakat menurun. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu daerah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Seperti persentase penduduk miskin di kota Bontang, data 2023 tercatat 4,11 persen. Jumlah ini turun 0,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan 4,54 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di kota Bontang dalam tren turun, bergerak dari kemiskinan sebesar 5,1 persen menuju ke 4,11 persen dengan total penduduk pada 2023 lalu di kota Bontang berjumlah 187,45 ribu jiwa.

Kemiskinan merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan stunting. Ragam penyebab stunting lekat dengan kemiskinan. Asumsi dasarnya adalah, kemiskinan membuat orang kesulitan mendapatkan makanan bergizi dengan harga terjangkau. Kemiskinan juga erat kaitannya dengan kesulitan mendapatkan akses sanitasi yang layak dan air bersih. Berdasarkan data dari e-PPGBM Prevalensi *stunting* Kota Bontang di tahun 2023 berada di angka 19.6%, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 22.8%. Sedangkan berdasar SSGI dan SKI prevalensi *stunting* di Kota Bontang justru meningkat dari 21% di tahun 2022 menjadi 27,4% di tahun 2023. Untuk jumlahnya sendiri di tahun

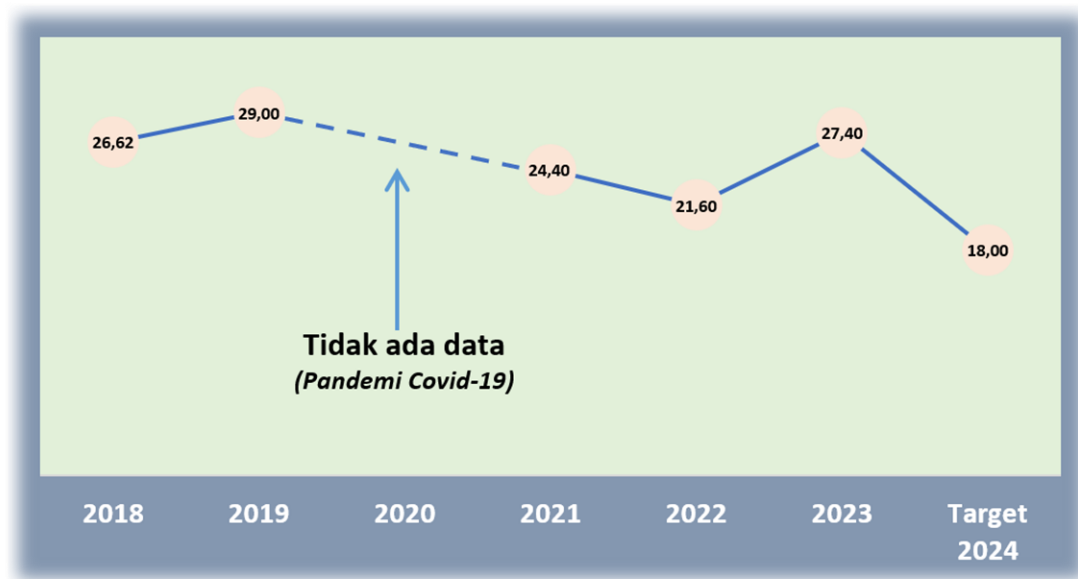
2023 tercatat terdapat 1.786 anak *stunting* di Kota Bontang. Lokasi utama yang menjadi fokus penanganan *stunting* di Bontang adalah Berebas Pantai, Guntung, Bontang Kuala, dan Tanjung Laut indah.



Gambar 2.12.
Tingkat Penduduk Miskin Kota Bontang 2018–2024
 (Sumber: diolah dari Profil Kemiskinan Kota Bontang, BPS-2024)

Target yang diharapkan untuk tingkat penduduk miskin Kota Bontang di tahun 2024 adalah sebesar 3,9 persen. Sementara itu, berdasarkan profil kemiskinan Kota Bontang 2023 sebesar 4,11 persen. Dalam rangka penurunan *stunting*, pemerintah Kota Bontang dalam pengimplementasian kebijakan penanganan *stunting* dilakukan dari hulu ke hilir. Pencapaian program yang telah dilaksanakan dalam kurun 2023, dan bagaimana target yang disusun untuk peningkatan program di tahun 2024. Pemerintah Kota Bontang perlu meningkatkan kinerja dalam penurunan angka *stunting* di tahun 2024. Selain itu kerjasama antar berbagai pihak adalah hal yang mutlak dan semua bergerak bukan atas nama pemerintah, akan tetapi atas nama Kota Bontang.

Upaya pemerintah Kota Bontang untuk menurunkan angka *stunting* melalui Dinas Kesehatan bersama pihak terkait melakukan berbagai intervensi dengan menjalankan program-program kesehatan secara intens, dan terus melakukan pembinaan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Sehingga target yang diharapkan untuk angka *stunting* di tahun 2024 adalah mencapai 18 persen. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021–2026, pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun hingga 17 persen pada tahun 2025.



Gambar 2.13.
Angka Stunting Kota Bontang 2018–2024

(Sumber: diolah dari hasil SKI Kalimantan Timur, Dinkes Kaltim- 2024)

Kondisi dan proyeksi dari perekonomian, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, dan angka *stunting* di Kota Bontang ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur untuk menyusun RKPD Kota Bontang Tahun 2024 dengan tema “Peningkatan SDM Unggul, Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Penataan Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan Untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan Pembangunan difokuskan pada upaya-upaya strategis dan taktis untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD. Dengan dicapainya tujuan dan sasaran pembangunan, maka diharapkan dapat tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing Kota Bontang, namun juga mampu mendukung investasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, serta menengah.

Kebijakan ekonomi makro Kota Bontang diarahkan pada “peningkatan daya saing investasi, pariwisata, dan UMKM melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup”. Untuk mendukung hal tersebut, maka pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi ditarget 2,65 persen dengan PDRB perkapita ditargetkan Rp 338,60 juta serta tingkat inflasi 2,58 persen. Sektor industri pengolahan masih menjadi pendorong utama. Selain pada industri pengolahan migas dan petrokimia, peluang pada industri pengolahan CPO diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Di sisi lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang diharapkan akan naik berkisar antara 4,41 – 5,3 persen.

Sesuai dengan RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan ekonomi menargetkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada akhir tahun 2024 dapat mencapai 5,3 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut prioritas pembangunan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2024



menekankan pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan investasi, pariwisata dan UMKM.

Tabel 2.3. Target Ekonomi Makro Kota Bontang Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas (%)	4,41 – 5,3
2.	PDRB Per Kapita (juta Rp)	338,60
3.	Laju inflasi (%)	2,58

Sumber: RKPD Kota Bontang Tahun 2024

Ada pun arah kebijakan ekonomi Bontang pada tahun 2024 akan berfokus pada:

- 1) Pengembangan dan peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui:
 - a) meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
 - b) pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
 - c) diversifikasi industri yang berorientasi pada ekonomi hijau; dan
 - d) pengembangan pariwisata berbasis pada potensi lokal;
- 2) Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui:
 - a) peningkatan kualitas pendidikan;
 - b) peningkatan kualitas kesehatan;
 - c) percepatan penurunan stunting; dan
 - d) peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi calon tenaga kerja;
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a) percepatan penurunan kemiskinan;
 - b) peningkatan Sistem Jaminan Sosial; dan
 - c) peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan.
- 4) Pembangunan infrastruktur yang produktif.

Kerangka ekonomi daerah Kota Bontang Tahun 2024 meliputi target ekonomi makro yang direncanakan pada perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024. target ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Kota Bontang untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi Kota Bontang menjadi **“Kota Bontang yang Hebat dan Beradab”** yang kemudian dirumuskan dalam prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.



2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran memerlukan dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar kapasitas keuangan daerah, maka sesungguhnya akan semakin banyak pilihan prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan yang diemban. Namun demikian, perencanaan pembangunan daerah pada umumnya selalu dihadapkan pada situasi dimana kebutuhan pembangunan melampaui kemampuan keuangan daerah yang dapat dihimpun. Oleh sebab itulah diperlukan penyusunan perencanaan pembangunan agar kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

2.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Nasional

Kementrian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada April 2024 mengalami surplus sebesar Rp 75,7 triliun atau 0,33 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 924,9 triliun per April 2024. Nilai itu setara dengan 33 persen dari target APBN sebesar Rp 2.802,3 triliun. Kinerja pendapatan negara terkontraksi sebesar 7,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan dengan April 2023. Dibanding tahun lalu, pendapatan negara terjadi penurunan. Namun, kinerja belanja negara mengalami peningkatan sebesar 10,9 persen yoy. Jumlah realisasi belanja negara hingga April 2024 tercatat sebesar Rp 849,2 triliun. Nilai ini setara dengan 25,5 persen dari pagu APBN sebesar Rp 3.325,1 triliun. Sejalan dengan surplus itu, surplus keseimbangan primer juga masih terjaga. Keseimbangan primer hingga akhir April tercatat sebesar Rp 237,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Surplus keseimbangan primer mengindikasikan penerimaan negara cukup memadai untuk membiayai belanja negara sekaligus membayar seluruh atau sebagian pokok dan bunga utang.

Dengan mencermati dinamika APBN diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan keuangan Indonesia tahun 2024 berfokus pada mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat fondasi, agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal. Adapun arah kebijakan keuangan dengan fokus, yaitu:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024;



- 2) Mengakselerasikan penurunan prevalensi stunting menuju 14 persen pada tahun 2024;
- 3) Berupaya mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat; dan
- 4) Mendorong peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalimantan Timur

Realisasi sementara Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga bulan Februari 2024 sebesar Rp 8,73 triliun (13,33 persen dari target). Pendapatan APBD didominasi dari Dana Transfer dan PAD. Pendapatan dari Dana Transfer hingga bulan Februari 2024 sebesar Rp 6,61 triliun (13,14 persen dari target). Pendapatan dari Dana Transfer dan PAD masing-masing berkontribusi sebesar 75,72 persen dan 24,17 persen terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, realisasi sementara Belanja APBD s.d. bulan Februari 2024 sebesar Rp 1,85 triliun (2,64 persen dari pagu Rp 70,19 triliun). Penerimaan pajak telah terealisasi sebesar Rp 4,77 triliun (10,40% dari target), mengalami penurunan sebesar -5,93 persen yoy. Penurunan pajak tersebut dipengaruhi oleh mayoritas kelompok pajak di wilayah Kaltim mengalami pertumbuhan negatif, kecuali jenis pajak PBB dan pajak lainnya. Pertumbuhan negatif tersebut akibat harga CPO di pasar global dan pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan yang menurun. Hal serupa terjadi pada Pajak Perdagangan Internasional yang mengalami pertumbuhan minus, utamanya disebabkan oleh perlambatan penerimaan Bea Keluar sebesar -77,15 persen. Sementara itu hingga Februari 2024, Bea Masuk mengalami peningkatan 9,05 persen karena importasi gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya yang naik.

Kinerja keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur merupakan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup kegiatan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan serta pertanggung-jawaban keuangan daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam rangka pelekaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Penentuan arah kebijakan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan realisasi keuangan tahun sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan negara dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 serta asumsi kerangka ekonomi makro. kebijakan keuangan daerah Kota Bontang diarahkan sebagai berikut:



1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan upaya pencapaiannya melalui:
 - a. Meningkatkan PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri.
 - b. Mengoptimalkan pendapatan transfer yang terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dana Alokasi Umum (DAU), dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).
 - c. Mengoptimalkan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota.
2. Belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pengalokasian belanja daerah wajib memprioritaskan belanja pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Analisis Belanja Daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif;
3. Melakukan penyesuaian dalam pembiayaan daerah untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.

2.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Kota Bontang

Perkembangan yang mendukung perbaikan indikator perekonomian selama tahun 2024 hingga memasuki triwulan II tahun 2024 baik dalam lingkup nasional dan daerah, termasuk perkiraan realisasi penerimaan negara tahun 2024 yang akan melampaui targetnya, maka pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pendapatan daerah pada perubahan APBD diperkirakan akan mengalami peningkatan 16,09 persen dibandingkan dengan target dalam APBD Tahun 2024. Peningkatan ini utamanya ditopang oleh adanya peningkatan pada komponen pendapatan transfer, yakni pendapatan transfer Pemerintah Pusat sesuai Perpres 98 tahun 2023 sebesar 16,01 persen. Hingga bulan Juni 2024, Pendapatan Kota Bontang telah terealisasi sebesar Rp1.003.224.854.252,47 dari target pendapatan tahun 2024 yang ditetapkan dengan nilai sebesar Rp2.379.581.074.122,00 atau sebesar 42,16 persen. Dari sisi belanja terealisasi dengan nilai sebesar Rp859.748.814.434,60 dari target belanja yang diproyeksikan sebesar Rp2.840.317.411.456,00 atau sebesar 30,27 persen. Sedangkan dari sisi pembiayaan dari target sebesar Rp460.736.337.334,00 telah terealisasi sebesar Rp605.260.697.136,10 atau 131,37 persen.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan ekonomi daerah diharapkan pada tingkat yang positif dengan menggunakan dana pembangunan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2024 secara umum diarahkan:

- 1) Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2024, yaitu: intensifikasi dan ekstensifikasi



sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;

- 2) Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2024 secara efektif dan efisien; dan
- 3) Kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk kegiatan usaha dalam peningkatan usaha yang berorientasi pada profit. Lebih lanjut usaha yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Kondisi ekonomi Indonesia dan upaya strategis yang akan dilaksanakan pemerintah menjadi pertimbangan dalam perubahan arah ekonomi dan kebijakan makro fiskal tahun 2024. Seperti mengenai dinamika dan tantangan perekonomian global, kinerja perekonomian domestik dan Arah Kebijakan Makro Fiskal 2024. Dimana kondisi ekonomi Indonesia termasuk kuat di tengah berbagai gejolak ekonomi. Indonesia, Tiongkok dan India menjadi negara yang ekonominya tumbuh konsisten di atas pertumbuhan global. Meskipun demikian, ke depannya Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai tantangan, antara lain yaitu: tensi geopolitik, pandemi, perubahan iklim dan digitalisasi.

Perubahan iklim dan digitalisasi ini menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang bagi Indonesia. Saat ini Indonesia punya peluang untuk ekosistem elektronik, digital dan otomotif khususnya *electric vehicles*. Kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami tren pemulihan yang berlanjut, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh di atas 5% dalam 6 kuartal berturut-turut. Selain itu, Indonesia juga berhasil menurunkan inflasi dengan cepat.

Sementara itu, terkait arah kebijakan fiskal tahun 2024, diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, dengan mengusung tema kebijakan fiskal 2024, yaitu: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Guna mempercepat transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045, pemerintah berfokus pada kebijakan jangka pendek melalui pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi. Sementara fokus kebijakan menengah-panjang untuk *human capital gap*, *infrastructure gap* dan *institutional gap*.

3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan *Gross National Income per kapita (Atlas Method)* menjadi US\$ 4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori *upper-middle income countries*. Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi untuk menjamin kesinambungan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Dalam jangka pendek diarahkan tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5–3,5 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah pada rentang Rp 14.300–Rp 15.400 per US\$.



Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023 – 2024

INDOKATOR	2023 REALISASI	2024 APBN	2024 KEM PPKF
Pertumbuhan Ekonomi (%;yoy)	5,05	5,2	5,3 – 5,7
Inflasi (%;yoy)	2,61	2,8	1,5 – 3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	14.300 – 15.400
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,88	6,7	6,49 – 6,91
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75 – 85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	597 – 652
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	999 – 1.054

Sumber: KEM PPKF Tahun 2024 dan 2025 (diolah)

Dinamika perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh perlambatan ekonomi global yang diperkirakan hanya tumbuh 2,8 persen. Inflasi yang masih persisten tinggi, berlanjutnya pengetatan kebijaksanaan moneter yang berpotensi meningkatkan *cost of fund*, meningkatnya tensi geopolitik serta fragmentasi global menyebabkan melemahnya propek ekonomi global. Beberapa risiko global yang menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024. Risiko tersebut antara lain: potensi pelemahan aktivitas ekonomi di beberapa negara (Tiongkok, AS, dan Eropa) akibat gejolak di sektor keuangan; inflasi global yang persisten tinggi; fleksibilitas kebijakan fiskal yang semakin terbatas; serta perekonomian Indonesia tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan positif.

Pasar komoditas khusus migas pada tahun 2024 diproyeksikan fluktuatif. Hal ini terutama sebagai dampak tensi geopolitik dan adanya kebijakan moneter ketat untuk merespons tekanan inflasi. Namun dalam jangka menengah perlu diantisipasi penurunan permintaan terhadap minyak bumi akibat kebijakan green government dan transisi energi global dari *fossil fuel* menjadi energi baru terbarukan (EBT).

3.1.2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2024

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut kebijakan fiskal 2024 didorong agar tetap sehat dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas pada *output/outcome* (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2024, maka postur makro fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Postur Makro Fiskal, 2023 – 2025 (dalam % PDB)**

U R A I A N	2023 REALISASI (<i>unaudited</i>)	2024	2024
A. Pendapatan Negara & Hibah	13,32	11,81 – 12,38	12,27
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	9,91 – 10,18	10,12
2. PNBPN	2,93	1,90 – 2,18	2,16
3. Hibah	0,081	0,010 – 0,020	0,002
B. Belanja Negara	14,94	13,97 – 15,01	14,56
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,43 – 11,37	10,91
2. Transfer Daerah	4,22	3,54 – 3,65	3,76
C. Keseimbangan Primer	0,49	0,00 – (0,43)	(0,11)
D. Defisit Anggaran	(1,62)	(2,16) – (2,64)	(2,29)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,30) – (0,67)	(0,77)
2. Rasio Utang	38,98	38,07 – 38,97	38,26

Sumber: KEM PPKF Tahun 2024 dan 2025 (diolah)

Risiko fiskal dikelompokkan ke dalam empat taksonomi berdasarkan karakteristik sumber risiko. Taksonomi tersebut adalah antar lain: risiko ekonomi makro, risiko kewajiban kontinjensi, risiko program dan kebijakan pemerintah, dan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pengelompokkan ini mengikuti praktik-praktik yang berlaku umum di berbagai negara tanpa mengurangi substansi dan arah pengelolaan risiko fiskal. Pada tahun 2024, area risiko diperluas mencakup pula risiko fiskal daerah sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Bontang Tahun 2024

Asumsi dasar ekonomi makro ditunjukkan melalui Indikator Kinerja Pembangunan Kota Bontang Tahun 2024. Indikator ini menggambarkan Kinerja Pemerintah Kota Bontang yang bersifat makro. Indikator kinerja makro menggambarkan keberhasilan pemerintah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan. Kondisi ekonomi makro di tahun 2023 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 5,36 persen. Salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi positif baik di Kota Bontang maupun Provinsi Kalimantan Timur yaitu meningkatnya lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan yang masih mendominasi dan merupakan sektor strategis dalam PDRB. Adapun target indikator makro Kota Bontang Tahun 2024 pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3. Target Indikator Makro Kota Bontang Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (angka)	81,20	81,56	82
2.	Angka Kemiskinan (%)	4,03	4,11	3,8
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,20	7,74	7,35
4.	Pertumbuhan Ekonomi Migas (%)	2,50	5,36	3,5 – 4,5
5.	PDRB Per Kapita (juta Rupiah)	329,54	366,46	347,76
6.	Indeks Gini (angka)	0,320	0,299	0,291

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

3.2.2. Kebijakan Makro Fiskal Kota Bontang Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan diperlukan kebijakan makro fiskal suatu daerah. kebijakan ini yang menjadi instrumen penting untuk mendesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah dapat meningkatkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi motivasi pemerintah daerah untuk efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang berdampak pada pencapaian target-target dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun arah kebijakan makro fiskal Kota Bontang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Kebijakan Makro Fiskal Kota Bontang Tahun 2024
(dalam milyar rupiah)

U R A I A N	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	PENETAPAN APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024
A. PENDAPATAN DAERAH	1.797,91	2.448,30	2.379,58	2.772,30
1. Pendapatan Asli Daerah	231,35	264,42	245,00	296,33
2. Pendapatan Transfer	1.511,31	2.175,13	2.124,42	2.456,04
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	55,25	8,75	10,16	19,94
B. BELANJA DAERAH	1.444,48	2.214,49	2.840,32	3.352,56
1. Belanja Operasi	1.191,86	1.551,89	1.875,65	2.100,53
2. Belanja Modal	250,25	661,03	958,17	1.248,40
3. Belanja Tidak Terduga	2,38	1,53	6,50	3,63
4. Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PEMBIAYAAN DAERAH	42,98	371,41	460,74	580,26
1. Penerimaan Pembiayaan	62,98	396,41	485,74	605,26
2. Pengeluaran Pembiayaan	20,00	25,00	25,00	25,00
SILPA	396,41	605,26	0,00	0,00

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2022-2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 (diolah)



BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksi untuk Tahun 2024

Kebijakan perubahan pendapatan daerah dikarenakan adanya Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024, dimana perubahan dilakukan dengan membandingkan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024. Berdasarkan ini, maka pendapatan daerah diperlukan penyesuaian dari proyeksi sebelumnya. Secara umum perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang diproyeksikan pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	245.000.000.000	296.329.967.393	51.329.967.393	20,95
4.2	Pendapatan Transfer	2.124.425.955.595	2.456.035.969.439	331.610.013.844	15,61
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.155.118.527	19.936.618.796	9.781.500.269	96,32
	Jumlah Pendapatan	2.379.581.074.122	2.772.302.555.628	392.721.481.506	16,50

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Perubahan pendapatan daerah dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 16,50 persen atau sebesar 392.721.481.506 ,00 dari semula sebesar Rp2.379.581.074.122,00 menjadi Rp2.762.535.342.457,00.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

4.1.1. Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah

Memperhatikan kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Kota Bontang Tahun 2024 dengan dasar perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024, maka perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang Tahun 2024 secara rinci sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2. Perubahan PAD Kota Bontang Tahun 2024**

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	245.000.000.000	296.329.967.393	51.329.967.393	20,95
4.1.01	Pajak Daerah	146.845.288.166	148.640.154.163	1.794.865.997	1,22
4.1.02	Retribusi Daerah	86.497.854.568	126.512.187.027	40.014.332.459	46,26
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.075.813.311	4.075.813.311	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.581.043.955	17.101.812.892	9.520.768.937	125,59

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Perubahan PAD dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 20,95 persen atau sebesar Rp51.329.967.393,00 dari semula sebesar Rp245.000.000,00 menjadi Rp296.329.967.393,00. Pajak daerah meningkat sebesar 1,22 persen atau sebesar Rp1.794.865.997,00. Retribusi daerah diproyeksikan naik 46,26 persen atau sebesar Rp40.014.332.459,00 dalam Proyeksi P-APBD Tahun 2024. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan sedangkan untuk lain – lain PAD yang sah naik sebesar 125,59 persen atau sebesar Rp9.520.768.937,00.

4.1.2. Perubahan Target Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dengan memperhatikan kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Kota Bontang tahun 2024, maka perubahan target pendapatan transfer di tahun 2024 atas dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2024 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 4.3. Perubahan Pendapatan Transfer Kota Bontang Tahun 2024

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.124.425.955.595	2.456.035.969.439	331.610.013.844	15,61
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.752.568.485.595	2.084.178.499.439	331.610.013.844	18,92
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	371.857.470.000	371.857.470.000	0	0,00

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Perubahan pendapatan transfer yakni pendapatan transfer Pemerintah Pusat dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 15,61 persen atau sebesar Rp331.610.013.844,00 dari



semula Rp2.124.425.955.595,00 menjadi Rp2.456.035.969.439,00. Sedangkan untuk pendapatan Transfer antar Daerah tidak mengalami kenaikan.

4.1.3. Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Kota Bontang Tahun 2024, maka perubahan target lain-lain pendapatan daerah yang sah atas dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Bontang yang Ditarget Pada Tahun 2024**

KODE	URAIAN	MURNI	PROYEKSI PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.155.118.527	19.936.618.796	9.781.500.269	96,32
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.684.139.648	1.684.139.648	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.470.978.879	18.252.479.148	9.781.500.269	115,47

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik sebesar Rp19.936.618.796,00 dari nilai sebelumnya sebesar Rp10.155.118.527,00 atau mengalami kenaikan sebesar 96,31%. Kenaikan tersebut dikarenakan terdapat penambahan pendapatan dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari bagi hasil keuntungan bersih perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebesar Rp.9.781.500.269,00. Sedangkan Pendapatan Hibah tidak mengalami kenaikan.

Adapun penyajian data realisasi anggaran tahun 2022–2023, dan atas dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2024 untuk melihat perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2024 secara lengkap sebagai berikut:



Tabel 4.5. Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022–2024 (dalam rupiah)

NOMOR KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024 APBD
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.797.913.747.493,54	2.448.306.492.422,68	2.379.581.074.122,00	2.772.302.555.628,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	231.351.605.844,18	264.421.428.875,68	245.000.000.000,00	296.329.967.393,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	134.539.080.196,35	118.218.692.064,81	146.845.288.166,00	148.640.154.163,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.959.817.810,90	2.961.878.370,00	86.497.854.568,00	126.512.187.027,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.847.655.621,23	3.487.431.779,72	4.075.813.311,00	4.075.813.311,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	89.005.052.215,70	139.753.426.661,15	7.581.043.955,00	17.101.812.892,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.511.309.158.077,95	2.175.130.370.652,00	2.124.425.955.595,00	2.456.035.969.439,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.300.948.692.401,95	1.857.072.687.433,00	1.752.568.485.595,00	2.084.178.499.439,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.360.465.676,00	318.057.683.219,00	371.857.470.000,00	371.857.470.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55.252.983.571,41	8.754.692.895,00	10.155.118.527,00	19.936.618.796,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.582.141.867,22	8.754.692.895,00	1.684.139.648,00	1.684.139.648,00
4.3.03	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.04	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.670.841.704,19	0,00	8.470.978.879,00	18.252.479.148,00

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2022-2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 (diolah)



Tabel 4.6. Distribusi Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2022–2024
(dalam persen)

NOMOR KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024 APBD
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	12,87	10,80	10,30	10,69
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	58,15	44,71	59,94	50,16
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1,71	1,12	35,31	42,69
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,66	1,32	1,66	1,38
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	38,47	52,85	3,09	5,77
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	84,06	88,84	89,28	88,91
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	86,08	85,38	82,50	84,86
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13,92	14,62	17,50	15,14
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3,07	0,36	0,43	0,72
4.3.01	Pendapatan Hibah	15,53	100,00	16,58	8,45
4.3.03	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.04	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	84,47	0,00	83,42	91,55

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2022-2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 (diolah)



BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah menggambarkan nilai anggaran untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang disesuaikan dengan besarnya pendapatan daerah yang diperoleh. Dengan adanya perubahan dari pendapatan daerah, maka nilai belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari perubahan tersebut. Perubahan ini dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024. Secara umum kebijakan perencanaan perubahan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Perubahan Belanja Daerah Kota Bontang yang Ditarget Pada Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5	BELANJA DAERAH	2.840.317.411.456,00	3.352.563.252.764,00	512.245.841.308,00	18,03
5.1	BELANJA OPERASI	1.875.645.227.283,00	2.100.527.700.954,00	224.882.473.671,00	11,99
5.2	BELANJA MODAL	958.172.184.173,00	1.248.401.735.454,00	290.229.551.281,00	30,29
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.500.000.000,00	3.633.816.356,00	(2.866.183.644,00)	(44,10)

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Perubahan belanja daerah dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024. Perubahan belanja daerah Kota Bontang tahun 2024 diproyeksikan Rp3.352.563.252.764,00 naik sebesar Rp502.478.628.137,00 atau 18,03 persen dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp2.840.317.411.456,00.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

5.1.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, Belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Berdasarkan Kebijakan perencanaan perubahan Belanja Daerah Kota Bontang dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 untuk anggaran perubahan belanja operasi di tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.2. Perubahan Belanja Operasi Kota Bontang Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5.1	BELANJA OPERASI	1.875.645.227.283,00	2.100.527.700.954,00	224.882.473.671,00	11,99
5.1.01	Belanja Pegawai	777.282.110.479,00	845.894.771.906,00	68.612.661.427,00	8,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.681.967.507,00	1.162.065.398.456,00	151.383.430.949,00	14,98
5.1.05	Belanja Hibah	86.681.149.297,00	91.567.530.592,00	4.886.381.295,00	5,64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	0,00

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Perubahan Belanja Operasi tahun 2024 berdasarkan perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 menjadi sebesar 2.100.527.700.954,00 atau naik sebesar Rp224.882.473.671,00 (11,99 persen) dari nilai sebelumnya sebesar Rp1.875.645.227.283,00.

5.1.2. Rencana Perubahan Belanja Modal

Kebijakan perencanaan perubahan belanja daerah Kota Bontang dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 untuk perubahan belanja modal di tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3. Perubahan Belanja Modal Kota Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5.2	BELANJA MODAL	958.172.184.173,00	1.248.401.735.454,00	290.229.551.281,00	30,29
5.2.01	Belanja Modal Tanah	37.482.902.000,00	66.452.902.000,00	28.970.000.000,00	77,29
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.873.267.822,00	185.449.422.646,00	25.576.154.824,00	16,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	263.057.796.196,00	268.415.738.202,00	5.357.942.006,00	2,04
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	493.182.459.698,00	723.548.957.506,00	230.366.497.808,00	46,71
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.019.236.985,00	2.956.168.574,00	(63.068.411,00)	(2,09)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.556.521.472,00	1.578.546.526,00	22.025.054,00	1,42

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Perubahan belanja modal Kota Bontang Tahun 2024 dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 naik sebesar 30,29 persen atau sebesar

Rp290.229.551.281,00 dari pagu sebelumnya sebesar Rp958.172.184.173,00 menjadi Rp1.248.401.735.454,00

5.1.3. Rencana Perubahan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan perencanaan perubahan belanja daerah Kota Bontang dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 untuk perubahan belanja tidak terduga di tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.4. Perubahan Belanja Tidak Terduga Kota Bontang Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.500.000.000,00	3.633.816.356,00	(2.866.183.644,00)	(44,10)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	3.633.816.356,00	(2.866.183.644,00)	(44,10)

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Belanja tidak terduga Kota Bontang Tahun 2024 mengalami penurunan dari sebesar Rp6.500.000.000,00 menjadi Rp3.633.816.356,00 atau 44,10%. Penggunaan Belanja Tidak Terduga telah digunakan sebesar Rp2.866.183.644,00 untuk mengatasi permasalahan terkait kurangnya anggaran listrik dan air di Sekretariat Daerah dan guna memaksimalkan proses pelayanan Perangkat Daerah.

5.1.4. Rencana Perubahan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer ini meliputi: Belanja Bagi Hasil; 2) belanja bantuan keuangan. Transfer berkaitan dengan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim tidak diproyeksikan, hal ini sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara dan keuangan provinsi. Namun akan diupayakan seoptimal mungkin untuk mendapatkan alokasi yang semakin meningkat guna menunjang program pembangunan prioritas perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024.

Adapun penyajian data realisasi tahun 2022-2023 dan distribusi dengan dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2024 untuk melihat kebijakan perencanaan perubahan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2024 secara lengkap sebagai berikut:

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN KOTA BONTANG 2024



Tabel 5.5. Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2022–2024 (dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BELANJA DAERAH		1.444.485.193.852,71	2.214.458.110.841,32	2.840.317.411.456,00	3.352.563.252.764,00
I. Belanja Operasi		1.191.545.901.239,71	1.551.892.075.448,32	1.875.645.227.283,00	2.100.527.700.954,00
1.	Belanja Pegawai	548.463.610.192,11	571.593.451.714,00	777.282.110.479,00	845.894.771.906,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	600.544.251.142,60	867.525.260.190,32	1.010.681.967.507,00	1.162.065.398.456,00
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Hibah	39.655.249.905,00	111.127.371.310,00	86.681.149.297,00	91.567.530.592,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	2.882.790.000,00	1.645.992.234,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
7.	Belanja Bantuan Keuangan	312.747.040,00	0,00	0,00	0,00
II. Belanja Modal		250.247.642.640,00	661.033.963.537,00	958.172.184.173,00	1.248.401.735.454,00
1.	Belanja Tanah	2.387.756.800,00	1.520.000.000,00	37.482.902.000,00	66.452.902.000,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	86.743.381.712,00	245.818.086.686,00	159.873.267.822,00	185.449.422.646,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	57.127.100.859,00	118.003.698.038,00	263.057.796.196,00	268.415.738.202,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.770.176.243,00	289.457.351.037,00	493.182.459.698,00	723.548.957.506,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.475.251.236,00	4.390.143.417,00	3.019.236.985,00	2.956.168.574,00
6.	Belanja Aset Lainnya	743.975.790,00	1.844.684.359,00	1.556.521.472,00	1.578.546.526,00
III. Belanja Tidak Terduga		2.378.902.933,00	1.532.071.856,00	6.500.000.000,00	3.633.816.356,00
	Belanja Tidak Terduga	2.378.902.933,00	1.532.071.856,00	3.633.816.356	3.633.816.356,00
IV. Belanja Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2022-2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 (diolah)



Tabel 5.6. Distribusi Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2022 – 2024
(dalam persen)

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BELANJA DAERAH		100,00	100,00	100,00	100,00
I. Belanja Operasi		82,51	70,08	66,04	62,65
1.	Belanja Pegawai	46,02	36,83	41,44	40,27
2.	Belanja Barang dan Jasa	50,39	55,90	53,88	55,32
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Hibah	3,33	7,16	4,62	4,36
6.	Belanja Bantuan Sosial	0,24	0,11	0,05	0,05
7.	Belanja Bantuan Keuangan	0,03	0,00	0,00	0,00
II. Belanja Modal		17,32	29,85	33,73	37,24
1.	Belanja Tanah	0,95	0,23	3,91	5,32
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	34,66	37,19	16,69	14,85
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	22,83	17,85	27,45	21,50
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	40,67	43,79	51,47	57,96
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,59	0,66	0,32	0,24
6.	Belanja Aset Lainnya	0,30	0,28	0,16	0,13
III. Belanja Tidak Terduga		0,16	0,07	0,23	0,11
	Belanja Tidak Terduga	100,00	100,00	100,00	100,00
IV. Belanja Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2022-2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 (diolah)



BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada:

- 1) Perkiraan anggaran surplus, anggaran dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Perkiraan anggaran defisit, anggaran dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2023;
- 3) Stabilitas keuangan daerah, diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Adapun perubahan pembiayaan daerah Kota Bontang dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Tahun 2024 (dalam rupiah)

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	485.736.337.334,00	605.260.697.136,00	119.524.359.802	24,61
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0	-
	Pembiayaan Netto	460.736.337.334,00	580.260.697.136,00	119.524.359.802	25,94
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	0	

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Pembiayaan Netto daerah Kota Bontang tahun 2024 mengalami peningkatan 25,94 persen atau Rp119.524.359.802,00 dari semula sebesar Rp460.736.337.334,00

naik menjadi Rp580.260.697.136,00. Berikut secara rinci berkaitan dengan kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2024, meliputi:

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 berkaitan dengan kebijakan penerimaan pembiayaan adalah bersumber pada perkiraan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kota Bontang pada tahun anggaran 2024 diperkirakan berasal dari SiLPA. SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pada tahun 2024. Adapun perubahan penerimaan pembiayaan berdasarkan perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 6.2. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kota Bontang Tahun 2024
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	485.736.337.334,00	605.260.697.136,00	119.524.359.802	24,61
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	485.736.337.334,00	605.260.697.136,00	119.524.359.802	24,61

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Kota Bontang diproyeksikan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp605.260.697.136,00. SiLPA tersebut bertambah sebesar Rp119.524.359.802,00 atau 24,61 persen dari semula sebesar Rp485.736.337.334,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan, seperti: embayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan agenda dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicukupi pendanannya, maka di tahun 2024 ada pengeluaran untuk pembiayaan untuk penyertaan Modal Daerah. Berdasarkan berdasarkan perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2024 perubahan pengeluaran pembiayaan Kota Bontang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3. Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang Tahun 2024
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0	-

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 (diolah)

Pengeluaran pembiayaan Kota Bontang Tahun 2024 tidak mengalami perubahan sesuai dengan proyeksi sebelumnya. Dimana pengeluaran pembiayaan di target pada penyertaan modal pada PT Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) dialokasikan sebesar Rp 25.000.000.000,00.

Adapun penyajian data realisasi pembiayaan daerah tahun 2022-2023 dan dengan dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2024 untuk melihat perubahan pembiayaan daerah Kota Bontang tahun 2024 secara lengkap adalah sebagai berikut:



Tabel 6.4. Realisasi, Proyeksi, dan Penetapan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2022–2024
(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD TAHUN 2024	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	62.983.793.938,91	396.412.531.480,00	485.736.337.334,00	605.260.697.136,00
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	62.983.793.938,91	396.412.531.480,00	485.736.337.334,00	605.260.697.136,00
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	42.983.793.938,91	371.412.531.480,00	460.736.337.334,00	580.260.697.136,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	396.412.347.579,74	605.260.697.136,10	0,00	0,00

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2022-2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024 (diolah)



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN PERUBAHAN

7.1. Strategi Pencapaian Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA Tahun 2024 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan perubahan RKPD Tahun 2024. Perubahan ini dapat dilihat dari perkembangan kondisi aktual kinerja ekonomi nasional dan daerah dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah Kota Bontang Tahun 2024 hingga memasuki semester I tahun 2024. Dengan kondisi ini, maka kebijakan perubahan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun strategi pencapaian perubahan pendapatan daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Peningkatan PAD dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan. Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Pengelolaan PAD difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan PAD dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
- d. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD, sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment;
- e. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas;
- f. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;



- g. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan konfirmasi status wajib pajak.
 - h. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal; dan
 - i. Mengoptimalkan penerimaan lain-lain PAD yang sah dengan meningkatkan pemanfaatan secara optimal aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat dikelola serta meningkatkan penerimaan BLUD.
2. Peningkatan Pendapatan Transfer
- Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer sebagai berikut:
- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU maupun (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID) dapat lebih optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU dan DAK maupun DID.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Upaya dalam mengoptimalkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan
 - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian lain-lain pendapatan daerah yang sah.

7.2. Strategi Pencapaian Perubahan Belanja Daerah

Perubahan RKPD selaras dengan program prioritas pembangunan daerah dan nasional. Adapun Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 masih dengan tema **“Peningkatan SDM Unggul, Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan**



Penataan Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan Untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Perubahan RKPD ini dalam rangka percepatan pencapaian sasaran utama dengan memperhatikan upaya pencapaian tujuan akhir pembangunan jangka menengah pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Prioritas utama dalam perubahan RKPD diharapkan dapat mendorong terwujudnya indikator kinerja tahun 2024, dimana perubahan ini selaras dengan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan nasional. Adapun perubahan RKPD juga akan mengubah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) daerah. Perubahan KUA salah satunya adalah kebijakan perubahan belanja daerah, dimana kebijakan ini diarahkan pada program unggulan dalam prioritas pembangunan daerah.

Perubahan KUA Kota Bontang untuk kebijakan perubahan belanja daerah berfokus pada untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Adapun permasalahan yang selalu terjadi dalam menentukan kebijakan belanja adalah kebutuhan belanja yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini perlu dilakukan penyeimbangan antar potensi rendahnya pertumbuhan pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja, sehingga belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan dengan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka Pemerintah Kota Bontang menentukan strategi pencapaian perubahan belanja daerah pada tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah mengacu dengan Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2024 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam mengatur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer guna mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada perangkat daerah;
- 2) Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
- 3) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan Kota Bontang tahun 2024;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
- 5) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bontang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;



- 6) Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. seperti pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 7) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada Perubahan RKPD tahun 2024;
- 8) Meningkatkan asas ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas seperti pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak; dan
- 9) Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.

7.3. Strategi Pencapaian Perubahan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai perubahan target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah semester I Tahun Anggaran 2024. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang dalam mencapai perubahan target pembiayaan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) estimasi perkiraan tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2024, didasarkan pada analisa perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2) Optimalisasi penggunaan SiLPA untuk pemenuhan belanja prioritas;
- 3) Evaluasi dan optimalisasi kinerja BUMD.
- 4) Pengeluaran pembiayaan daerah, untuk penyertaan modal sebagaimana pemenuhan kewajiban daerah dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang pengelolaannya mempedomani Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan harapan memperoleh deviden yang optimal dalam peningkatan PAD.



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan KUA Kota Bontang Tahun 2024, merupakan pedoman pelaksanaan APBD Perubahan tahun anggaran 2024 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan KUA Kota Bontang Tahun 2024, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien sesuai dengan strategi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang pada matriks tahun ketiga, sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. dengan penjabaran Perubahan KUA Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 disusunlah prioritas dan plafon anggaran perubahan untuk disepakati bersama.

Demikianlah Perubahan KUA Kota Bontang Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Bontang, 29 Juli 2024

Ketua DPRD,

Wali Kota Bontang,


ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM


BASRI RASE